



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 63 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat peningkatan kemampuan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, daya saing, pertumbuhan ekonomi, kemajuan dan kemandirian daerah, serta menumbuhkan kemampuan sistem inovasi daerah yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, perlu pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, serta berdasarkan arah, prioritas, dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disusun dalam suatu kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2014 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
6. Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Jakstrada Iptek adalah Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021.
7. Agenda Riset Daerah yang selanjutnya disingkat ARD adalah Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021.

Pasal 2

- (1) Jakstrada Iptek merupakan dokumen kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan 2021.
- (2) Jakstrada Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi arah kebijakan dan prioritas utama bidang fokus pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten.
- (3) Jakstrada Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Prioritas utama bidang fokus pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dijabarkan lebih lanjut dalam ARD.
- (2) ARD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 4

Jakstrada Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ARD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku bagi seluruh pelaksana pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten.

Pasal 5

Pembebanan biaya pelaksanaan Jakstrada Iptek dan ARD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 14 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 14 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 66

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017-2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	4
1.4 Sistematika	5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	6
2.1 Kondisi Saat Ini	6
2.2 Isu Strategis	17
BAB III VISI DAN MISI	34
3.1 Visi	34
3.2 Misi	34
3.3 Prinsip Dasar	34
3.4 Nilai (Value)	35
BAB IV KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, LANGKAH MENUJU PACITAN MAJU DAN SEJAHTERA	36
4.1 Tujuan	38
4.2 Sasaran	38
4.3 Arah Kebijakan	38
4.4 Prioritas Utama Bidang Fokus	39
BAB V PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Status dan Letak Geografis Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Pacitan	7
2.2	Luas Daerah Kabupaten Pacitan Menurut Jenisnya (Km ²) Tahun 2014	8
2.3	Potensi Pariwisata Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Pacitan	10
2.4	Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Pacitan	11
2.5	Potensi Perindustrian Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Pacitan	11
2.6	Jumlah Desa, Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk, Rata-Rata Penduduk Per Desa dan Kepadatan Penduduk Per Km ² Tahun 2011-2014 Kabupaten Pacitan	11
2.7	Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2014 Kabupaten Pacitan	12
2.8	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan	13
2.9	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan	13
2.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Dan 2014	14
2.11	Pemetaan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Isu/Kebijakan Internasional, Nasional dan Provinsi	17
2.12	Identifikasi RPJMD Daerah Lain	22
2.13	Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi I	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Skema Proses Penyusunan JAKSTRADA IPTEK Dan ARD Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021	3
2.1	Peta Kabupaten Pacitan	6
2.2	Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019	19
2.3	Peta Pembagian Kawasan Pengembangan	28
2.4	Karakteristik dan Potensi Unggulan Kawasan Pengembangan	28
2.5	Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar- Nawangan-Tegalombo	29
2.6	Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo- Sudimoro-Tulakan	30
2.7	Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Punung- Pringkuku-Donorojo	30
2.8	Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Pacitan- Arjosari-Kebonagung	31
4.1	Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul Grafik	Halaman
2.1	Luas Kabupaten Pacitan Menurut Kecamatan Tahun 2014	7
2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 – 2014	14
2.3	Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014 Kabupaten Pacitan	15
2.4	Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2014	16
2.5	Persandingan IPM Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2014	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah menyadari bahwa dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek untuk memperkuat posisi daya saing daerah dalam kehidupannya, baik dalam menghadapi peluang maupun tantangan kehidupan regional, nasional dan global. Oleh karena itu, daerah perlu merencanakan dan melaksanakan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek dengan pendekatan yang lebih optimal dan strategis. Iptek merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan Iptek, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemajuan Iptek juga mendorong terjadinya globalisasi kehidupan manusia karena manusia semakin mampu mengatasi dimensi jarak dan waktu dalam kehidupannya. Perbedaan lokasi geografis dan batas daerah bukan lagi merupakan hambatan utama. Keadaan tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi daerah yang mampu menguasai, memanfaatkan, dan memajukan Iptek untuk memperkuat posisinya dalam pergaulan dan persaingan antar daerah.

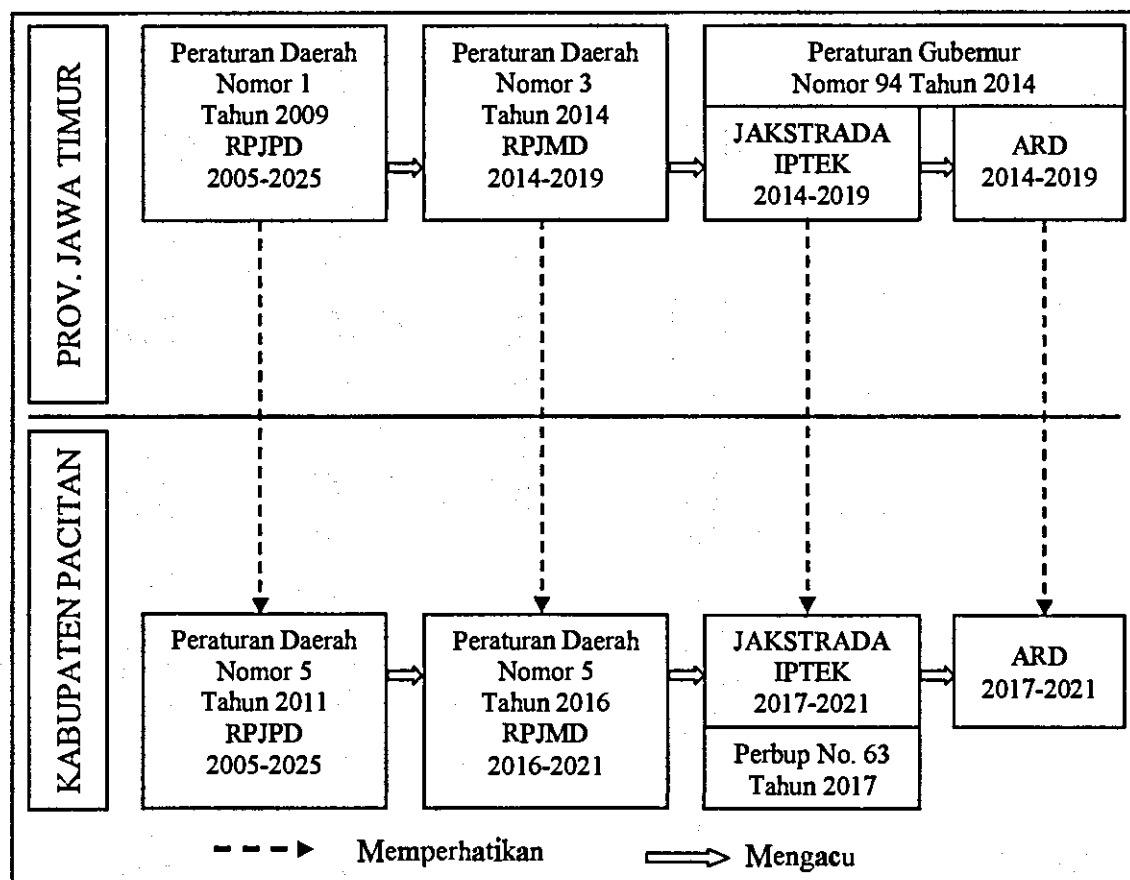
Keberhasilan daerah maju dalam menumbuhkembangkan kemampuan Iptekin karena daerah itu mampu menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya Iptekin yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain secara bersistem. **Faktor Kesatu:** Kemampuan menumbuhkan jaringan antara unsur-unsur kelembagaan Iptekin (Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha, dan Lembaga Penunjang) untuk membentuk rantai yang mengaitkan kemampuan melakukan pembaharuan di bidang Iptekin dengan kemampuan memanfaatkan kemajuan yang terjadi ke dalam barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Melalui jaringan itu terjadi berbagai bentuk transaksi sehingga sumber daya Iptekin mengalir dari unsur kelembagaan yang satu ke unsur kelembagaan yang lain. Dengan demikian, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif. **Faktor Kedua:** Kemampuan memberikan iklim usaha yang kompetitif, sehingga persaingan antar pelaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pasar atau sumber daya alam saja, namun lebih ditentukan oleh kemampuan inovatif dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang bermutu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhnya iklim seperti itu menimbulkan tarikan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan Iptekin untuk terus mencari terobosan Iptekin, dan menghasilkan invensi yang tidak saja memperkaya khazanah Iptekin, melainkan juga memberikan peluang baru bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan berbagai inovasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. **Faktor Ketiga:** Kemampuan menumbuhkan daya dukung.

Dukungan berbagai pihak sangat diperlukan, terutama dukungan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme, pengalokasian sumber daya, pembentukan kepastian usaha, penyelenggaraan aliran permodalan, pemberdayaan standardisasi, serta penentuan persyaratan dan pengawasan, baik untuk melindungi kepentingan kehidupan manusia maupun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sinergi perkembangan kelembagaan dan sumber daya Iptekin dengan ketiga faktor itulah yang membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kapasitas Iptekin serta pendayagunaannya dalam kegiatan ekonomi.

Dalam Pasal 219 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 diamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan (Kelitbangan) menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Fungsi Kelitbangan (Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek) ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mendukung peningkatan “Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat”. Peran Kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung “Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah”, dalam rangka percepatan Pembangunan Daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi Kelitbangan tersebut, Daerah perlu menyusun Kerangka Kebijakan Kelitbangan Pemerintah Daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam suatu Konsep Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Bidang Kelitbangan secara komprehensif dan sinergis. Upaya mencapai keberhasilan Pembangunan Daerah tidak dapat dilepaskan dari penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Di samping itu, dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Litbangrap Iptek) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menetapkan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sisnas Litbangrap Iptek. Selanjutnya pada ayat (2) mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan fungsi dimaksud, Pemerintah Daerah **wajib** merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang Iptek yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan Iptek di daerahnya. Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (JAKSTRADA IPTEK) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 sepenuhnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Selain itu, juga memperhatikan JAKSTRADA IPTEK

Provinsi Jatim Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Pergub Jatim Nomor 94 Tahun 2014. Secara Skematis Proses Penyusunan JAKSTRADA IPTEK dan Agenda Riset Daerah (ARD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1
Skema Proses Penyusunan JAKSTRADA IPTEK dan ARD
Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Ilmu Pengetahuan di dalam Jakstrada Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 ini didefinisikan sebagai rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis menggunakan pendekatan tertentu dilandasi metodologi ilmiah kuantitatif dan/atau kualitatif, yang bersifat deskriptif, eksploratif, maupun eksplanatif mengenai gejala non-sosial dan/atau sosial tertentu. Sedangkan Teknologi adalah cara atau metode, dan proses atau produk, yang dihasilkan dari penerapan serta pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia, serta masyarakat, baik berbentuk piranti keras (*Hardware*) maupun lunak (*Software*). Dengan definisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) seperti itu, Jakstrada Iptek dan ARD Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021, tidak “terkungkung” dalam definisi Iptek yang sempit, sehingga dapat mengakomodasi berbagai Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan/tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan prioritas Program Pembangunan Daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, dengan mengangkat Visi “*Maju dan Sejahtera*

Bersama Rakyat” dengan motto Kelitbangan/Inovasi Daerah **“Langkah Menuju Pacitan Maju dan Sejahtera (LAJUPAMARA) Berbasis Iptekin”**.

1.2 Tujuan

Penyusunan Jakstrada Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 bertujuan:

1. Untuk memenuhi/melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sisnas Litbangrap Iptek;
2. Untuk memberikan/merumuskan arah, dan kerangka kebijakan, serta prioritas bidang fokus dalam penyusunan dan pelaksanaan program Kelitbangan/Inovasi Daerah (Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptekin) selama 5 (Lima) Tahun (2017-2021) bagi unsur kelembagaan Iptekin dan OPD, dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
3. Sebagai sumber rujukan bagi para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) pembangunan Iptekin Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Jakstrada Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemda;
9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 070/7004/SJ Tanggal: 01 Desember 2014, Hal: Pedoman Arah Program Kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2014 tentang Jakstrada Iptek Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan.

1.4 Sistematika

Dokumen Jakstrada Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Saat Ini
- 2.2 Isu Strategis

BAB III VISI DAN MISI

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi
- 3.3 Prinsip Dasar
- 3.4 Nilai (Value)

BAB IV KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, LANGKAH MENUJU PACITAN MAJU DAN SEJAHTERA

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran
- 4.3 Arah Kebijakan
- 4.4 Prioritas Utama Bidang Fokus

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Saat Ini

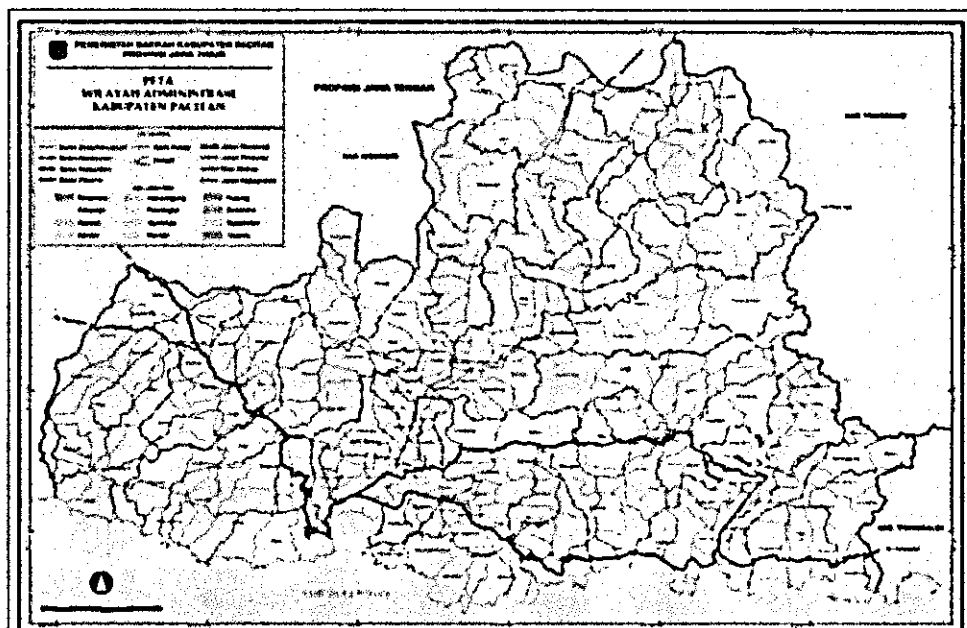
Kondisi Kabupaten Pacitan saat ini memberikan gambaran umum terhadap beberapa data dan informasi strategis yang mencakup: Karakteristik Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Demografi, Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.1.1 Karakteristik Wilayah

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 7,55° - 8,17° Lintang Selatan dan 110,55° - 111,25° Bujur Timur.

Batas Wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

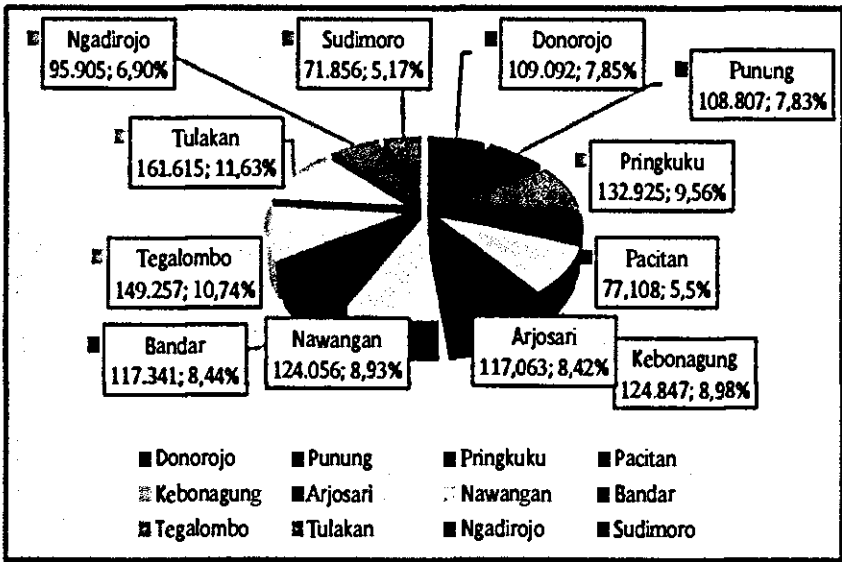


Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2018

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,87 Km², dimana secara administratif terbagi atas 12 Kecamatan yang terdiri dari 5 Kelurahan dan 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu seluas 71,86 Km².

Luas tanah sawah Kabupaten Pacitan sebesar 130,15 Km² atau sekitar 9,36% dan luas tanah kering adalah 1.259,72 Km² atau sekitar 90,6%. Sebagian besar dari tanah sawah adalah sawah tadah hujan sebesar 51,53%, dan sebagian besar dari tanah kering adalah untuk tanaman kayu-kayuan sebesar 35,89%. Berikut adalah Grafik dan Tabel tentang Luas Kabupaten Pacitan Menurut Kecamatan, Status Dan Letak Geografis Menurut Kecamatan, serta Luas Daerah Kabupaten Pacitan Menurut Jenisnya.



Sumber: Pacitan Dalam Angka Kabupaten Pacitan, Tahun 2015

Grafik 2.1
Luas Kabupaten Pacitan Menurut Kecamatan Tahun 2014

Tabel 2.1
Status dan Letak Geografis Menurut Kecamatan Tahun 2014
Kabupaten Pacitan

Kecamatan		Jumlah Desa/Kel	Status Daerah		Letak	
			Kota	Perdesaan	Pantai	Bukan Pantai
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Donorojo	12	-	12	3	9
2	Punung	13	1	12	-	13
3	Pringkuku	13	-	13	5	8
4	Pacitan	25	15	10	3	22
5	Kebonagung	19	1	18	7	12
6	Arjosari	17	2	15	-	17
7	Nawangan	9	-	9	-	9
8	Bandar	8	1	7	-	8
9	Tegalongbo	11	-	11	-	11
10	Tulakan	16	-	16	1	15
11	Ngadirojo	18	2	16	2	16
12	Sudimoro	10	-	10	4	6
Jumlah		171	22	149	25	146

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, Tahun 2015

Tabel 2.2
Luas Daerah Kabupaten Pacitan Menurut Jenisnya (Km²) Tahun 2014

Kecamatan		Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Donorojo	0,85	108,25	109,09
2	Punung	7,03	101,78	108,81
3	Pringkuku	4,47	128,46	132,93
4	Pacitan	12,07	65,04	77,11
5	Kebonagung	17,53	107,32	124,85
6	Arjosari	8,72	108,34	117,06
7	Nawangan	19,31	104,74	124,06
8	Bandar	16,77	100,57	117,34
9	Tegalombo	12,17	137,09	149,26
10	Tulakan	18,18	143,44	161,62
11	Ngadirojo	7,95	87,96	95,91
12	Sudimoro	5,12	66,74	71,86
Jumlah		130,15	1,259,72	1,389,87

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, Tahun 2015

Topografi Kabupaten Pacitan sebagian besar berupa pegunungan dan perbukitan sehingga menjadikan penggunaan lahan yang ideal pada kawasan tersebut berupa kawasan hutan. Hal ini menyimpan potensi hutan yang cukup besar. Dari potensi hutan ini sebagian akan dihasilkan berbagai jenis kayu yang tidak hanya diminati oleh masyarakat sekitar tetapi juga dipasarkan keluar Kabupaten Pacitan. Hutan di Kabupaten Pacitan terbagi menjadi hutan produksi yang luasnya mencapai 87,89% dari luas hutan yang ada, sedangkan sisanya 12,11% adalah hutan lindung. Luas areal hutan rakyat meningkat dikarenakan adanya penanaman tanaman kayu-kayuan yang cukup besar terutama karena adanya kegiatan pengembangan baik dari dukungan APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN maupun bantuan dari mitra usaha, pembuatan bedengan tanaman secara swadaya dan pembuatan kebun bibit rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pelestarian hutan semakin meningkat.

Berikut adalah kondisi topografi Kabupaten Pacitan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
2. Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
3. Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
4. Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
5. Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan tentang sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi penting. Sektor yang memiliki keunggulan dan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang di Kabupaten Pacitan. Potensi yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan secara umum dari berbagai komoditi Tahun 2011 - 2015 sebagai berikut:

1. **Pertanian**, meliputi komoditi ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, pisang, jeruk siam/keprok, janggolan, melinjo, jahe, kunyit, laos, temu lawak, dan kencur. Data produksi dan produktivitas komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Pacitan selama 5 (Lima) Tahun terakhir diuraikan pada aspek pelayanan umum urusan pilihan pertanian.
2. **Tanaman Perkebunan**, meliputi komoditi kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, aren, dan nilam.
3. **Ternak**, meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam broiler, ayam ras petelur dan itik/entok. Dari beberapa jenis ternak tersebut yang merupakan unggulan, data produksi peternakan di Kabupaten Pacitan 5 (Lima) Tahun terakhir diuraikan pada aspek pelayanan umum urusan pilihan pertanian.
4. **Kehutanan**, meliputi jati, mahoni, sengon laut, akasia, pinus, sono, bambu, dan gamelina.
5. **Energi dan Sumber Daya Mineral**, terdiri dari:
 - a. **Batu Bara**.
 - b. **Mineral Logam**: timah putih, nikel, timah hitam, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir besi, dan batu besi.
 - c. **Mineral Bukan Logam**: batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, fosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophyllit, fosil kayu, kalsedon/agate, kristal kuarsa, rijang, dan jasper.
 - d. **Batuan** : ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, dan lempung/tanah liat.
6. **Pariwisata**:

Kabupaten Pacitan memiliki banyak potensi wisata, baik wisata pantai, goa, maupun budaya. Berikut ini disajikan secara rinci.

Tabel 2.3
Potensi Pariwisata Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Pacitan

No.	Jenis Wisata	Lokasi		Jarak Dari Pusat Kota
1.	Wisata Pantai	Pantai Teleng Ria	Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan	3 Km
		Pantai Watukarung	Desa Watukarung, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Segara Anakan	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	30 Km
		Pantai Tamperan	Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan	3 Km
		Pantai Srau	Desa Candi, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Taman	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	32 Km
		Pantai Wawaran	Desa Sidomulyo, Kec. Kebonagung	15 Km
		Pantai Klayar	Desa Widoro, Kec. Donorojo	53 Km
		Pantai Dhaki	Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro	48 Km
		Pantai Buyutan	Desa Widoro, Kec. Donorojo	45 Km
		Pantai Pancer Door	Kel. Ploso, Kec. Pacitan	3 Km
		Pantai Kafi Wuluh	Desa Klesem, Kec. Kebonagung	20 Km
		Pantai Soge	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	28 Km
		Pantai Pidakan	Desa Jetak, Kec. Tulakan	25 Km
2.	Wisata Goa	Goa Tabuhan	Desa Wareng, Kec. Punung	40 Km
		Goa Gong	Desa Bomo, Kec. Punung	30 Km
		Goa Putri	Desa Kendal, Kec. Punung	29 Km
3.	Wisata Sejarah / Budaya	Monumen Panglima Besar Jendral Soedirman	Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan	50 Km
		Monumen Tumpak Rinjing	Desa Dadapan, Kec. Pringkuku	12 Km
4.	Wisata Rekreasi	Pemandian Air Hangat	Desa Karangrejo, Kec. Arjosari	15 Km

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Tahun 2016

7. **Kelautan dan Perikanan:** Potensi unggulan kelautan dan perikanan Kabupaten Pacitan, terdiri dari : Tuna, Cakalang, Tongkol, Layur, Manyung, Lemuru, Tengiri, Rebon, Cucut, Pari, Kembung, Tiga Waja, Teri, Kakap Merah, Kuwe, Pisang-Pisang, Julung-Julung, Marlin, Sebelah, Bawal Hitam, Layang, Cucut Martil, Bawal Putih, Lemadang, Kuniran, Golok-Golok, Lobster, Lele dan Nila.

Tabel 2.4
Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi Perikanan (Ton)	6.244,07	7.006,49	9.275,32	9.338,57	11.692,87

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, Tahun 2016

8. **Perdagangan:**

Aspek perdagangan didukung melalui ketersediaan Pasar Daerah, sejumlah 18 buah dengan rincian di masing – masing Kecamatan sebagai berikut : Donorojo 1 buah, Punung 2 buah, Pringkuku 1 buah, Pacitan 4 buah, Arjosari 1 buah, Nawangan 1 buah, Bandar 2 buah, Tegalombo 1 buah, Tulakan 2 buah, Ngadirojo 2 buah dan Sudimoro 1 buah.

9. Perindustrian:

Potensi sektor perindustrian di Kabupaten Pacitan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Potensi Perindustrian Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Pacitan

No.	Uraian	Lokasi
1.	Batu Aji/Akik	Donorojo, Punung, Nawangan, Tulakan
2.	Gula Merah	Kebonagung, Donorojo, Tulakan
3.	Keramik dan Gerabah Seni	Kebonagung
4.	Batik Tulis	Ngadirojo, Pacitan
5.	Batu Bata	Kebonagung, Pacitan, Ngadirojo
6.	Kapur Tohor	Kebonagung
7.	Industri Makanan Olahan	Pacitan, Ngadirojo, Tulakan, Arjosari, Tegalombo, Pringkuku, Punung
8.	Meubelair	Kec. Pacitan
9.	Anyaman Bambu	Kec. Nawangan, Arjosari

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, Tahun 2016

2.1.3 Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama 5 (Lima) Tahun terakhir disajikan dalam Tabel 2.6 dan Tabel 2.7, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Desa, Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk, Rata-Rata Penduduk
Per Desa dan Kepadatan Penduduk Per Km² Tahun 2011-2014
Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan (Km2)	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Penduduk Per Desa	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Donorojo	12	109,09	40.446	3.371	371
2. Punung	13	108,81	37.521	2.886	345
3. Pringkulu	13	132,93	31.977	2.460	241
4. Pacitan	25	77,11	76.537	3.061	993
5. Kebonagung	19	124,85	45.542	2.397	365
6. Arjosari	17	117,06	41.672	2.451	356
7. Nawangan	9	124,06	52.734	5.859	425
8. Bandar	8	117,34	46.017	5.752	392
9. Tegalombo	11	149,26	55.900	5.082	375
10. Tulakan	16	161,62	86.994	5.437	538
11. Ngadirojo	18	95,91	49.017	2.723	511
12. Sudimoro	10	71,86	35.119	3.512	489
Jumlah Tahun 2014	171	1.389,87	599.476	3.506	431
Tahun 2013	171	1.389,87	599.476	3.508	432
Tahun 2012	171	1.389,87	599.476	3.430	422
Tahun 2011	171	1.389,87	599.476	3.429	422

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan, Tahun 2015

Jumlah penduduk beberapa Tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada Tahun 2011 sebesar 586.276 Orang dan mengalami peningkatan menjadi 599.939 Orang pada Tahun 2013. Sedangkan pada Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 599.476 Orang. Kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebesar 431 Jiwa/Km². Kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Pacitan sebagai Ibukota Kabupaten yang mencapai 993 Jiwa/Km², hal ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kecamatan lainnya yang hanya berkisar antara 241- 538 Jiwa/Km².

Tabel 2.7
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2014 Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Penduduk/Population		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun
	2013	2014	2013-2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Donorojo	40.776	40.446	-0,81
2. Punung	37.538	37.521	-0,05
3. Pringkulu	31.945	31.977	0,10
4. Pacitan	76.512	76.537	0,03
5. Kebonagung	45.481	45.542	0,13
6. Arjosari	41.338	41.672	0,81
7. Nawangan	52.578	52.734	0,30
8. Bandar	46.129	46.017	-0,24
9. Tegalombo	55.842	55.900	0,10
10. Tulakan	87.032	86.994	-0,04
11. Ngadirojo	49.213	49.017	-0,40
12. Sudimoro	35.555	35.119	-1,23
Jumlah	599.939	599.476	-0,08

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan, Tahun 2015

2.1.4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada satu waktu tertentu. Penyajian PDRB menurut sektor dirinci menurut total nilai tambah dari 17 sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian; kehutanan; perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; pengadaan air; pengelolaan sampah; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan; pertahanan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Nilai PDRB Kabupaten Pacitan Tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2013. Data PDRB ADHB

disajikan dalam Tabel 2.8 dan PDRB ADHK (2010) disajikan dalam Tabel 2.9, sebagai berikut:

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan

(Rp.000.000,00)

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2.853.202,20	3.205.937,20
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	543.347,00	619.434,50
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	638.930,10	703.833,80
D	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	2.912,90	3.001,80
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	8.766,50	9.586,40
F	KONSTRUKSI	1.402.753,40	1.587.605,70
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	1.518.502,60	1.669.333,70
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	188.539,60	217.275,00
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	174.723,40	200.978,50
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	521.087,70	563.524,00
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	178.491,50	202.167,00
L	REAL ESTATE	146.606,70	160.161,30
M,N	JASA PERUSAHAAN	25.385,30	27.689,10
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN	433.223,10	446.622,90
P	JASA PENDIDIKAN	451.339,50	509.039,70
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	83.892,90	95.619,70
R,S,T,U	JASA LAINNYA	243.961,30	276.807,00
JUMLAH / TOTAL		9.415.665,57	10.498.617,48

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, Tahun 2015

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2.306.121,00	2.392.241,20
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	497.298,50	516.399,10
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	564.622,20	590.005,40
D	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	3.331,10	3.424,20
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	7.845,00	8.072,40
F	KONSTRUKSI	1.182.250,10	1.239.596,90
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	1.366.145,60	1.456.620,10
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	176.665,90	195.994,10
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	154.615,50	167.569,00
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	505.967,90	544.065,40
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	150.879,20	161.881,30
L	REAL ESTATE	133.875,30	143.474,20
M,N	JASA PERUSAHAAN	22.417,00	23.904,60
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN	383.013,80	386.725,60
P	JASA PENDIDIKAN	392.604,00	420.610,50
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	76.925,50	83.109,90
R,S,T,U	JASA LAINNYA	228.591,40	243.882,10
JUMLAH / TOTAL		8.153.169,20	8.577.575,99

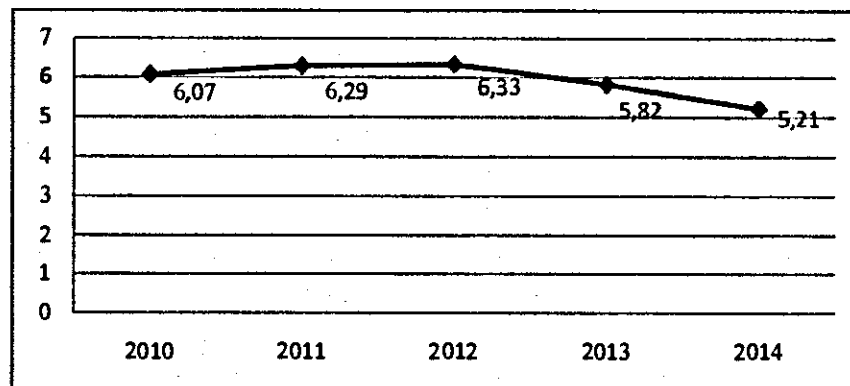
Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, Tahun 2015

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

PDRB ADHB Tahun 2014 sebesar 10.498,62 milyar rupiah meningkat sebesar 11,50% dari Tahun 2013, sedangkan PDRB ADHK (2010) Tahun 2014 meningkat menjadi 8.577,52 milyar rupiah atau sebesar 5,21% dari Tahun 2013. PDRB Tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, penyumbang terbesar adalah sektor pertanian, masing-masing sebesar 3.205,94 milyar rupiah dan 2.392,24 milyar rupiah. Bila dilihat peranan masing- masing sektor terhadap PDRB ADHB, sektor pertanian memberikan distribusi yang terbesar, yaitu sebesar 30,5%. Distribusi terkecil berasal dari sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 0,03%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan dapat dilihat dari indeks berantai atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebesar 5,21. Nilai ini turun sebesar 0,61 poin dibandingkan Tahun 2013 yang sebesar 5,82. Bila dilihat menurut per sektor, laju pertumbuhan terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,94. Bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya terdapat perbedaan percepatan pertumbuhan, dengan sektor jasa keuangan dan asuransi di Tahun 2013 merupakan sektor tertinggi pertumbuhannya yaitu sebesar 12,3. Berikut adalah Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan.



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, Tahun 2015

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%)
Tahun 2010 – 2014

Tabel 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Dan 2014

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2,47	3,73
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	3,87	3,84
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	4,86	4,50
D	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	3,86	2,79
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	7,83	2,90
F	KONSTRUKSI	7,07	4,85
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	8,57	6,62
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	9,96	10,94
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	8,61	8,38
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9,64	7,53

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	12,30	7,29
L	REAL ESTATE	7,58	7,17
M,N	JASA PERUSAHAAN	6,36	6,64
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN	2,04	0,97
P	JASA PENDIDIKAN	9,36	7,13
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	9,61	8,04
R,S,T,U	JASA LAINNYA	6,19	6,69
JUMLAH / TOTAL		5,82	5,21

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, Tahun 2015

* Angka Diperbaiki

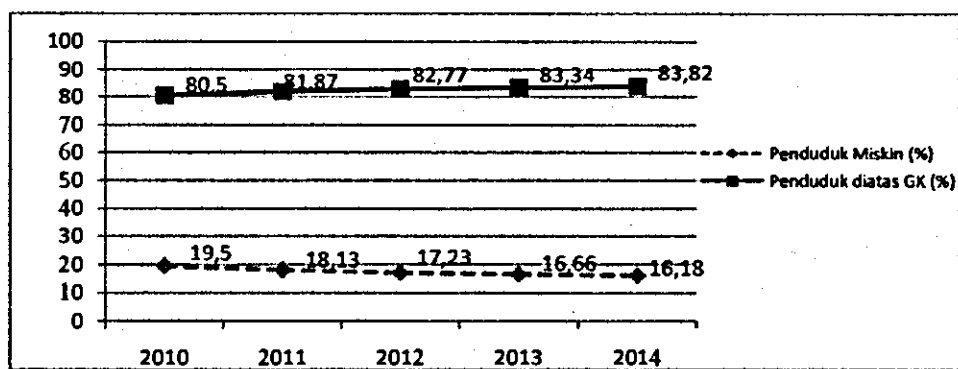
** Angka Sementara

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dilihat dari persentase penduduk di atas garis kemiskinan yang dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})\%$. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Data Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Pacitan disajikan pada Grafik 2.3 berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, Tahun 2015

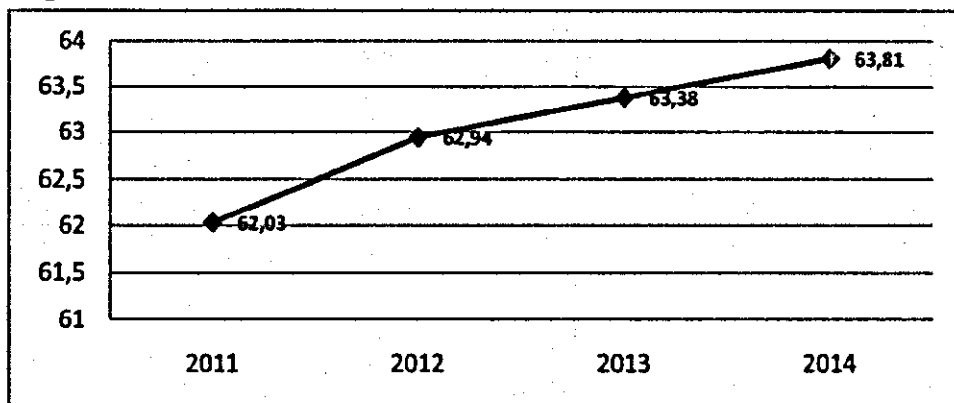
Grafik 2.3
Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan
Tahun 2010-2014 Kabupaten Pacitan

Dari Grafik 2.2 di atas tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan pada Tahun 2010 sebesar 19,50%, Tahun 2011 sebesar

18,13%, Tahun 2012 sebesar 17,23%, Tahun 2013 sebesar 16,66%, dan pada Tahun 2014 sebesar 16,18%, atau selama periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 3,32%. Angka tersebut masih jauh di atas tingkat kemiskinan Nasional (10,96%) maupun Provinsi Jawa Timur (12,28%). Artinya penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Pacitan pada Tahun 2014 sebesar 83,82%.

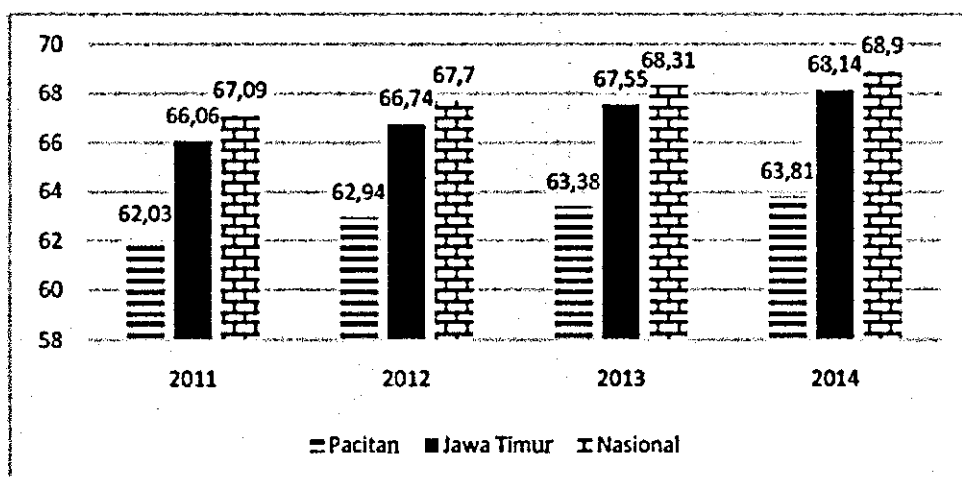
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari data Tahun 2011 yaitu sebesar 62,03, Tahun 2012 menjadi sebesar 62,94, Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 63,38, dan Tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 63,81. Perhitungan ini didasarkan pada formula perhitungan IPM yang baru yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Per-Kapita Per Tahun. Berikut disajikan Grafik 2.3 dan Grafik 2.4 Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2014.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015

Grafik 2.4
Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2014



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015

Grafik 2.5
Persandingan IPM Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2014

2.2 Isu Strategis

Dalam proses Pembangunan Daerah, setiap daerah akan dihadapkan kepada beberapa isu strategis dengan intensitas yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kekuatan dan peluang serta prospek Pengembangan Daerah tersebut. Kabupaten Pacitan memiliki banyak Potensi Daerah, namun demikian terdapat beberapa isu strategis yang akan mewarnai pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (Lima) Tahun ke depan (2016-2021).

2.2.1 Telaahan Isu/Kebijakan Internasional, Nasional Dan Provinsi

Penentuan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Pacitan dilakukan dengan pemetaan terlebih dahulu berkaitan dengan kebijakan pada tingkatan Internasional, Nasional maupun Regional (Provinsi). Pemetaan tersebut disajikan pada Tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11
Pemetaan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Isu/Kebijakan Internasional, Nasional dan Provinsi

Internasional	Nasional (RPJMN 2015-2019)	Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
1. Lingkungan Hidup. 2. Perkembangan Ekonomi. 3. Perkembangan Teknologi Informasi. 4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).	1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, Dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, Dan Industrialisasi. 3. Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan, Dan Penataan Ruang. Meningkatkan Reformasi Birokrasi, Dan Pelayanan Publik. 4. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Dan Harmoni Sosial.

Lebih lanjut uraian mengenai RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 diuraikan sebagai berikut:

1. RPJMN 2015-2019

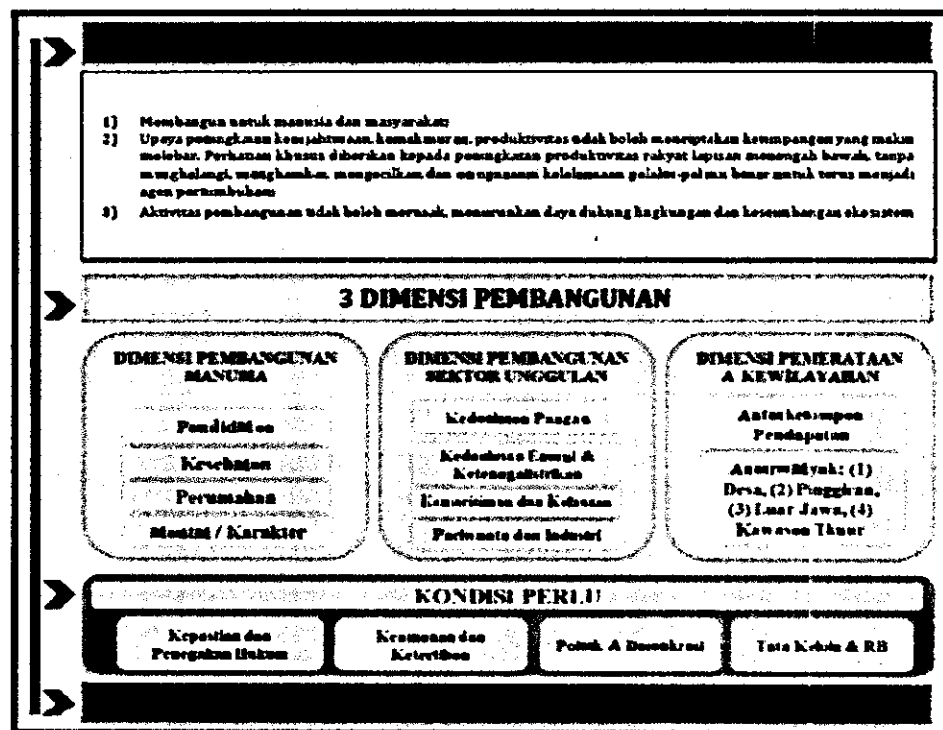
Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Untuk mewujudkan Visi ini ditetapkan 7 (Tujuh) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Guna menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (Sembilan) Agenda Prioritas. Kesembilan Agenda Prioritas itu disebut **NAWA CITA**, sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.11 di atas. Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk mewujudkan Nawacita disajikan pada Gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2
Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

Kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah yang disajikan di atas tentunya didukung dengan Pembangunan Daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Hal lain yang menjadi isu penting dalam menunjang pencapaian sebagian target nasional, yaitu mengenai *universal access* meliputi: akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) juga menjadi prioritas penanganan dalam RPJMD 2016-2021 ini.

Dalam Buku III RPJMN 2015-2019 disusun perencanaan pembangunan yang menggunakan pendekatan kewilayahan atau pulau. Berdasarkan hasil telaahan rencana pembangunan nasional untuk wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Pacitan, berikut ini disajikan beberapa arahan pembangunan yang berlokasi di Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Timur.

1. Sasaran Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Jawa-Bali adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 36 Kabupaten/Kota sasaran yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya, salah satunya adalah Kabupaten Pacitan. Adapun jenis bencana yang ada di Kabupaten Pacitan yaitu ancaman banjir dan tanah longsor;

2. Kegiatan strategis jangka menengah nasional di Provinsi Jawa Timur yang terkait sumber daya air salah satunya diprioritaskan untuk pembangunan Bendungan Wonodadi dan penyelesaian pembangunan Waduk Tukul di Pacitan.

2. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. RPJMD ini merupakan pedoman bagi pembangunan Provinsi Jawa Timur selama 5 (Lima) Tahun. Adapun Visi Pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah: **"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak"**.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur 2014-2019, ditempuh melalui Lima Misi yang diberi judul: "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik".

Lima Misi Pembangunan Jawa Timur 2014-2019, yaitu:

1. Misi Kesatu: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

2. Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan Usaha Mikro dan Koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah,

serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

3. Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah Provinsi yang berkelanjutan.

4. Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.

5. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan Visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” melalui 5 (Lima) Misi dalam bingkai “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, dilakukan berlandaskan 3 (Tiga) Strategi Umum, yaitu:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat;
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin, yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro poor*, *pro job*, *pro growth* dan *pro environment*;
3. Pengarusutamaan gender.

2.2.2 Telaah Daerah Sekitar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar.

Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah lain karena alasan:

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam Tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Telaahan Visi Dan Misi
1	Kabupaten Trenggalek	2016-2021	<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman Dan Taqwa.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan.2. Meningkatkan pembangman sektor pertanian serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna dan akses terhadap sarana produksi, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan.3. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur transportasi dari skala regional hingga tingkat desa, infrastruktur pertanian, infrastruktur lain, termasuk yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan selatan Trenggalek.4. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik di sektor pertanian dan sektor produktif lain serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat
2	Kabupaten Ponorogo	2016-2021	<p>Visi: Mewujudkan Ponorogo yang lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing.</p>

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Telaahan Visi Dan Misi
			<p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah. 2. Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih daya guna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah. 3. Mewujudkan pengelolaan instruktur strategis secara profesional agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktifitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Membangun Pertanian, sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh. 5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan. 6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakan hukum yang berkeadilan. 7. Meningkatkan peran aktif Pemda dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup, dan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertakwa, berbudaya dan berkepribadian.
3	Kabupaten Gunung Kidul	2016-2021	<p>Visi:</p> <p>Mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>). 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. 3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. 4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. 5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif. 6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.
4	Kabupaten Wonogiri	2016-2021	<p>Visi:</p> <p>Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Demokratis.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya yang meliputi unsur manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan pengawasan dengan semboyan SUKSES

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Telaahan Visi Dan Misi
			<p>sebagai pola managerial yang memiliki makna sebagaimana penjelasan singkat dalam Visi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, peningkatan kualitas kesehatan dengan program Wonogiri Sehat serta Wonogiri beriman sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing mengedepankan sikap toleransi antar umat; 3. Membangun dan memberdayakan Wonogiri dari pinggiran dengan memperkuat prioritas pembangunan di desa; 4. Meningkatkan produktivitas rakyat Wonogiri dan daya saing di segala bidang sehingga Wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain; 5. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya serta tradisi di masyarakat Wonogiri; 6. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan di segala bidang; 7. Mengembangkan seluruh potensi-potensi didalam jiwa dan raganya Wonogiri untuk kemaslahatan rakyat Wonogiri.

Sumber: Website Masing-Masing Kabupaten.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 4 (Empat) Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan juga memiliki periodesasi RPJMD yang sama dengan Kabupaten Pacitan, yaitu 2016-2021. Dengan kondisi tersebut, maka keempat daerah tersebut juga bersamaan menyusun dokumen RPJMD 2016-2021, sehingga substansi yang diidentifikasi dari RPJMD adalah Visi dan Misi masing-masing Daerah. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa Visi dan Misi tidak akan berubah, sedangkan informasi lainnya di dalam RPJMD memiliki kemungkinan berubah dalam berbagai tahapan pembahasan rancangan RPJMD menuju Perda RPJMD.

2.2.3 Telaahan RPJPD Kabupaten Pacitan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025. Dokumen ini memuat pedoman pembangunan Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 20 (Dua Puluh) Tahun mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2005–2025 adalah:

“Kabupaten Pacitan Yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera Yang Menjunjung Nilai-Nilai Agama dan Budaya”

Adapun Misi Kabupaten Pacitan 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya** dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Pacitan yang berdaya saing, berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata**, dicapai dengan cara peningkatan produksi pasca panen pada sektor industri pertanian, peningkatan hasil laut dan pengolahannya, serta menumbuhkan kembangkan pelayanan jasa pariwisata yang kompetitif dengan didukung antara lain oleh peningkatan peran Usaha Mikro dan usaha lainnya.
3. **Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktivitas Ekonomi yang Stabil** dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana daerah yang handal dan terintegrasi sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi, menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
4. **Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya**, dicapai dengan cara peningkatan stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban, konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM, jaminan mengemukakan pendapat, berorganisasi, dan berpolitik serta terjaminnya keleluasaan segenap aktivitas kehidupan bermasyarakat yang bertanggung jawab.
5. **Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan** dicapai dengan cara menyelenggarakan pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. **Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government** dicapai dengan cara membangun transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 (Lima) Tahunan merupakan penjabaran dari RPJPD, maka tahapan pelaksanaan RPJPD tersebut dituangkan dalam bentuk Fokus Pembangunan Lima Tahunan dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2025. Tahapan atau Fokus Pembangunan pada setiap periode harus menjadi panduan

pokok Kepala Daerah pada periode bersangkutan dalam menyusun RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan. Adanya Fokus pada setiap tahapan tidak berarti diabaikannya pembangunan di bidang lainnya. Hal itu semata-mata menunjukkan penekanan atau prioritas utama pembangunan pada setiap tahapan.

Saat ini pembangunan Kabupaten Pacitan memasuki Tahap Ketiga dari RPJPD. Untuk itu harus dilakukan telaah terhadap Arah Kebijakan Tahap Ketiga RPJPD. Pembangunan Tahap III (2016–2021) diarahkan untuk **Pemantapan Kemandirian Masyarakat**. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Pacitan yang memiliki kemandirian tinggi dalam membangun penghidupannya. Kemandirian tersebut sebagai implikasi dari berkembang pesatnya bidang pertanian, kelautan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan. Wujud kemandirian tersebut yang utama adalah rendahnya tingkat ketergantungan terhadap Pemerintahan Daerah, tingginya daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian masyarakat merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat, yaitu suatu situasi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan dalam arti yang sesungguhnya.

Adapun target setiap tahapan pencapaian indikator kinerja masing-masing Misi disajikan pada Tabel 2.13 berikut ini. Target indikator yang dimuat dalam RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 berdasarkan Misi.

Tabel 2.13
Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi I

No	Indikator Keberhasilan	Target Capaian			
		Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2021-2026)
MISI I					
1	Angka Melek Huruf (%)	96,58	96,65	96,71	96,77
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
	- APK PAUD	44	56	68	75
	- APK TK	45	56	67	80
	- APK SD/MI/PAKETA	103	103	103	103
	- APK SMP/MTs/ PAKET B	97,4	98	99	100
	- APK SMA/SMK/MA/PAKET C	68	75	82	95
	- APM SD/MI/PAKET A	98,99	99	99,5	99,9
	- APM SMP/MTs/ PAKET B	82	88	94	99,9
	- APM SMA/ SMK/ MA/ PAKET C	54	64	76	90
3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,11	71,32	71,53	71,76
4	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran)	< 4	< 4	< 4	< 4
5	Angka Kematian Bayi (Per 100.000 Kelahiran)	< 50	< 50	< 56	< 56
6	Jumlah PMKS (Orang)	80.781	70.265	61.119	53.162
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,028	0,030	0,032	0,035
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,87	0,75	0,63	0,54
9	Produktivitas PDRB TK	12.420.273	39.632.860	126.467.719	403.556.134
10	Angka Kemiskinan (%)	18,20	14,25	10,5	6,75

No	Indikator Keberhasilan	Target Capaian			
		Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2021-2026)
MISI II					
1	PDRB Perkapita (Rp)	5.781.065,28	6.311.155,60	6.841.245,92	7.371.336,24
2	NTP	116,71	120,61	124,50	128,40
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,52	7,38	8,24	9,10
MISI III					
1	Kondisi Jalan (m)				
	- Baik	760.970	1.095.322	1.576.578	2.269.288
	- Sedang	232.672	334.902	482.050	693.850
	- Rusak	103.746	149.330	214.942	309.382
	- Macadam	74.694	107.513	154.752	222.746
	- Tanah	52.284	75.256	108.322	155.916
2	Cakupan Pelayanan Air Bersih (Jiwa)	218.100	313.928	451.860	650.396
3	Rumah Layak Huni (Rumah)	114.764	165.188	237.767	342.236
4	Cakupan Jaringan Listrik (SR)	79.801	114.864	165.332	237.975
MISI IV					
1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pesta Demokrasi	67,69% - 70%	70% - 73%	73% - 76%	76% - 80%
2	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda Dan Organisasi Masyarakat Lainnya Yang Dibina	7,19% - 14%	14% - 19%	19% - 26%	26 % - 33%.
3	Rasio Linmas Inti Per 10.000 Penduduk	56,25%-61%	61% - 65%	65% - 68%	68% - 70%
MISI V					
1	Lahan Kritis (Ha)	23.233,00	22.248,73	21.264,45	20.280,18
2	Lahan Yang Ditangani (Ha)	1.795	1.935	2.075	2.215
MISI VI					
1	PAD (Rp.000)	34.384.121	41.030.501	54.908.066	73.479.378
2	Realisasi Investasi				
	- PMA (Rp.000)	74.659.500	124.075.750	173.492.000	222.908.250
	- PMDN (Rp.000)	21.600.000	39.600.000	57.600.000	75.600.000
3	Jumlah PNS	10.196	10.696	11.446	11.946
4	Tingkat Pendidikan Formal Aparatur				
	- D3/D4/S1	4.541	6.226	7.911	9.596
	- S2	250	350	450	550
	- S3	1	2	3	4

Sumber Data: RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025

2.2.4 Telaahan RTRW Kabupaten Pacitan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan mengatur struktur dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dilakukan telaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis RPJMD terkait dengan struktur dan pola ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010, yaitu bahwa:

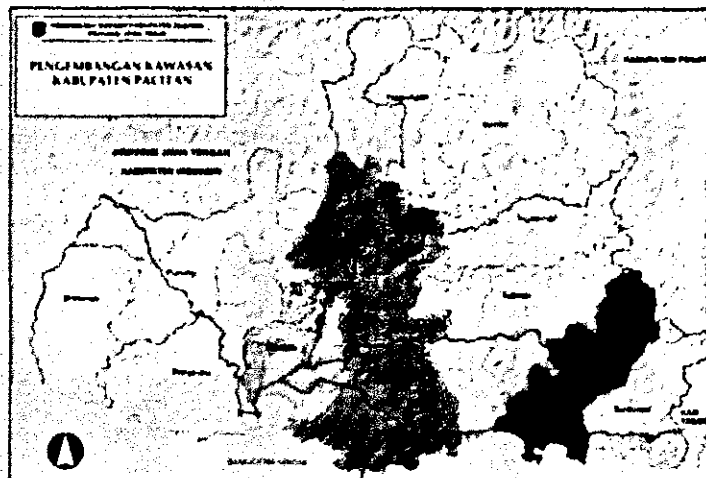
1. Memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang, yang memuat:
 - a. kebijakan dan strategi sistem perkotaan;
 - b. kebijakan dan strategi sistem perdesaan;
 - c. kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah.

2. Memperhatikan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, yang memuat:
 - a. kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung;
 - b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Berdasarkan hierarki dalam penataan ruang wilayah yang mendasarkan pada struktur dan pola ruang di atas, maka pembagian kawasan pengembangan berdasarkan tata ruang Kabupaten Pacitan dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi sebagai berikut:

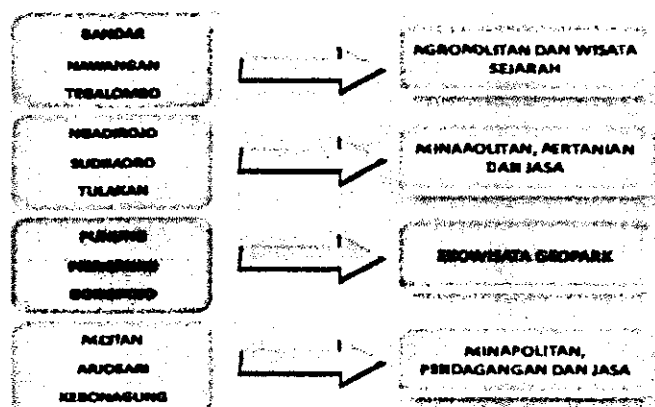
1. Bandar, Nawangan dan Tegalombo;
2. Ngadirojo, Sudimoro dan Tulakan;
3. Punung, Pringkuku dan Donorojo;
4. Pacitan, Arjosari dan Kebonagung.

Gambar 2.3 menunjukkan Peta Pembagian Kawasan Pengembangan berdasarkan tata ruang wilayah Kabupaten Pacitan.



Gambar 2.3
Peta Pembagian Kawasan Pengembangan

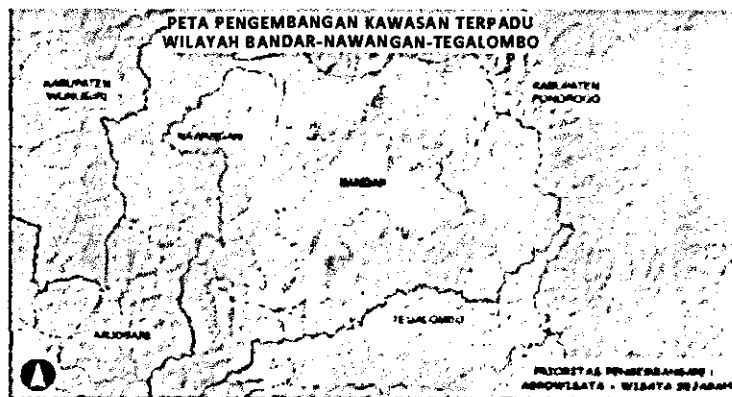
Masing-masing kawasan pengembangan mempunyai karakteristik dan potensi unggulan yang berbeda-beda. Berikut ini disajikan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing wilayah sebagaimana Gambar 2.4 berikut ini.



Gambar 2.4
Karakteristik dan Potensi Unggulan Kawasan Pengembangan

Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah, maka prioritas pengembangan kawasan adalah agropolitan dan wisata sejarah. Agropolitan dikembangkan untuk komoditas unggulan antara lain perkebunan (kopi, cengkeh dan janggelen), tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (jeruk, pisang dan cabe), dan biofarmaka (jahe) serta peternakan (sapi dan kambing). Untuk mendukung aktivitas agropolitan juga dikembangkan industri berbasis pertanian antara lain industri sale pisang dan anyaman bambu. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan, khususnya agropolitan pada wilayah ini diperlukan dukungan infrastruktur irigasi. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktivitas kawasan secara hierarki antara lain jalan Provinsi, jalan Kabupaten, dan jalan poros.

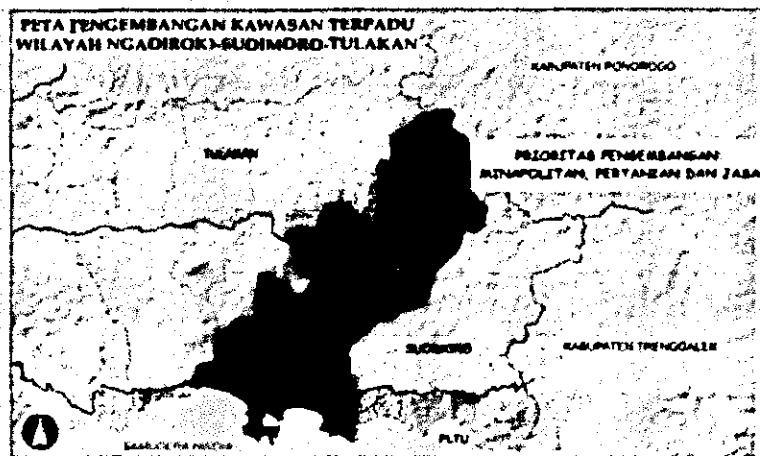


Gambar 2.5

Pengembangan Kawasan Terpadu Wdayah Bandar-Nawangan-Tegalombo

Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadlrojo-Sudimoro-Tulakan

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah, maka prioritas pengembangan kawasan adalah minapolitan, pertanian dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap. Untuk komoditas pertanian unggulan antara lain perkebunan (melinjo, kelapa, kakao dan cengkeh), tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (durian, sukun dan cabe), dan biofarmaka (jahe) serta peternakan (sapi dan kambing). Untuk mendukung aktivitas jasa juga dikembangkan industri kain batik tulis. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan khususnya minapolitan pada wilayah ini diperlukan dukungan infrastrnktur pelabuhan. Sedangkan sentra pertanian yang dibutuhkan adanya jaringan irigasi. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktivitas kawasan secara hierarki antara lain jalan Kabupaten dan jalan poros.

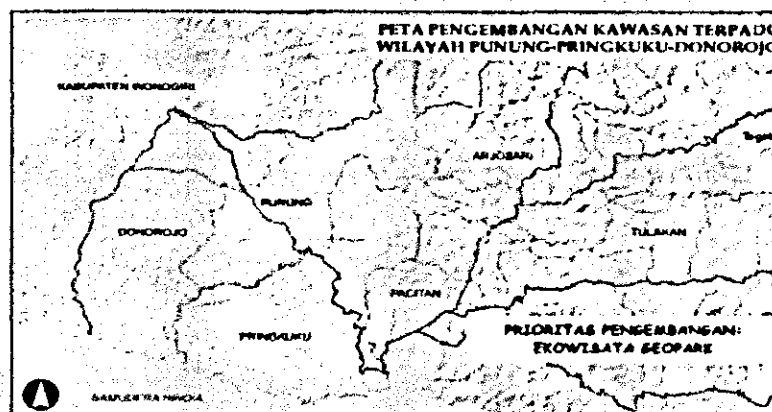


Gambar 2.6

Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan

Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah, maka prioritas pengembangan kawasan adalah ekowisata geopark. Ekowisata dikembangkan untuk pelestarian dan pengembangan kawasan wisata berkelanjutan, baik objek wisata pantai, goa, situs sejarah dan budaya guna mendukung Gunung Sewu sebagai jaringan Geopark Internasional. Untuk destinasi wisata unggulan antara lain Pantai Klayar, Goa Gong, Pantai Srau, Pantai Watukarung, Sungai Maron, Pantai Banyu Tibo. Untuk mendukung aktivitas pariwisata juga dikembangkan industri gula merah dan batu mulia. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktivitas kawasan secara hierarki antara lain jalan Nasional, jalan Kabupaten dan jalan poros.



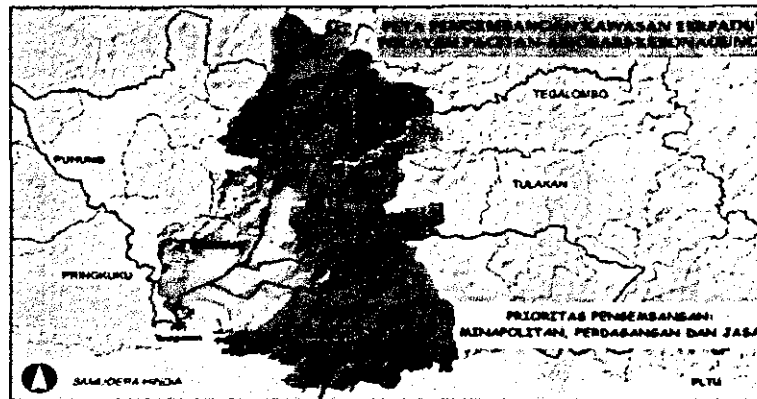
Gambar 2.7

Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo

Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah, maka prioritas pengembangan kawasan adalah minapolitan, perdagangan dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang didukung dengan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan. Untuk mendukung

aktivitas perdagangan dan jasa dikembangkan Pasar Daerah dan pusat pengembangan perekonomian Kabupaten.



Gambar 2.8
Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung

2.2.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 merupakan langkah yang dipakai untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan rencana pembangunan 5 (Lima) Tahun yang akan datang.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan yang akan datang, terutama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS menghasilkan beberapa isu strategis. Adapun isu strategis KLHS, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan angkutan;
2. Belum meratanya pelayanan air bersih;
3. Okupansi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya;
4. Adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur antar Kecamatan di Kabupaten Pacitan;
5. Kualitas SDM dan kesejahteraan sosial masih rendah;
6. Minimnya upaya peningkatan mitigasi bencana;
7. Tingginya angka kemiskinan;
8. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
9. Penguatan daya saing ekonomi;
10. Penguatan ketahanan pangan daerah;
11. Belum terdapat sistem jaringan persampahan yang merata.

2.2.6 Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar Daerah dalam perspektif Otonomi Daerah adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh Daerah. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki agar dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas

Pembantuan. Dengan demikian Daerah mempunyai *diskresi* atau keleluasaan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah.

Kerjasama Antar Daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip saling menguntungkan dan berorientasi pada kepentingan publik serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Kerjasama Antar Daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip : a) efisiensi, b) efektivitas, c) sinergi, d) saling menguntungkan, e) kesepakatan bersama, f) itikad baik, g) mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, h) persamaan kedudukan, i) transparansi, j) keadilan, dan k) kepastian hukum.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa Otonomi Daerah harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. Pelaksanaan kerja sama yang berdampak pada lintas Daerah dikelola bersama oleh Daerah terkait. Demikian pula untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan publik, Daerah wajib mengelola secara bersama dengan Daerah sekitarnya untuk kepentingan umum. Sedangkan istilah Kerja Sama Daerah sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, adalah Kesepakatan Antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Wali Kota atau antara Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu kebijakan yang dilaksanakan adalah melakukan kerjasama dengan Daerah lain yang diharapkan dapat mengurangi kerawanan sosial dan kesenjangan ekonomi Daerah. Sepanjang Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kerjasama Antar Daerah yang masih dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan, antara lain kerjasama dengan Kabupaten-Kabupaten di Daerah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri dan Wonosari Gunung Kidul), yang menghasilkan beberapa bidang yang dikerjasamakan yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perhubungan, bidang ketenagakerjaan, bidang kelautan, perikanan dan peternakan, bidang air bersih, bidang pekerjaan umum, bidang pariwisata, bidang ketertiban umum, bidang perkebunan, dan bidang kesejahteraan sosial. Untuk Kerjasama Antar Daerah Lintas Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang tergabung

dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) KARISMAPAWIROGO (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan Ponorogo), juga telah melakukan kerjasama dalam bidang: pelayanan kesehatan, pariwisata, pengembangan penanaman modal, penegakan Perda (POL PP), pendidikan, pemadam kebakaran, kesejahteraan sosial serta pembangunan infrastruktur jalan wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO. Selain itu ada juga Kerjasama Antar Daerah yang masih berbentuk "Paguyuban GOLEKPAWON" (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Wonogiri). Dalam kerjasama lintas wilayah perbatasan baik wilayah PAWONSARI, KARISMAPAWIROGO maupun GOLEKPAWON tersebut masih terdapat kendala yaitu belum tertanganinya beberapa hal secara optimal terutama bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang masih butuh perhatian dari semua pihak.

2.2.7 Isu Strategis Kabupaten Pacitan 2016-2021

Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta analisis terhadap isu-isu strategis yang ada pada tingkat global, nasional, regional maupun lokal dengan pendekatan analisis keterkaitan, maka isu strategis yang harus ditangani dalam 5 (Lima) Tahun kedepan oleh Kabupaten Pacitan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
4. Penguatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan;
5. Penguatan ketahanan pangan daerah;
6. Pembangunan infrastruktur dasar berkelanjutan;
7. Peningkatan kehidupan sosial, beragama dan pelestarian budaya lokal;
8. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

BAB III VISI DAN MISI

3.1 Visi

Visi Pembangunan Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 adalah: ***“Terwujudnya Pacitan Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi”***.

Pembangunan Iptek Kabupaten Pacitan pada hakikatnya direncanakan dan dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Daerah: ***Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat***. Untuk mewujudkan pencapaian Visi Pembangunan Daerah tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran serta dukungan penelitian, pengembangan, penerapan, dan pendayagunaan Iptekin.

Maju, memiliki makna bahwa pembangunan daerah dan masyarakat Pacitan mengarah ke depan menuju ke kondisi lebih baik, yang merupakan perwujudan sinergi semua pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi dan memperhatikan permasalahan yang ada.

Sejahtera, mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

3.2 Misi

Misi Pembangunan Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 adalah:

1. Meningkatkan penelitian, pengembangan, penerapan, dan pendayagunaan Iptekin sebagai basis kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
2. Memperkuat daya dukung Iptekin yang aplikatif dan kompetitif berbasis kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan, sekaligus sebagai “Langkah Menuju Pacitan Maju dan Sejahtera”.
3. Membangun sumber daya manusia menuju masyarakat yang berpengetahuan sebagai dasar pembangunan berbasis pengetahuan.
4. Melembagakan Iptekin dalam kehidupan masyarakat melalui Penguatan Inovasi Daerah, termasuk pengembangan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman Iptekin.

3.3 Prinsip Dasar

Pembangunan Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai luhur bangsa.
2. Keragaman atau kebhinekaan sebagai basis kewarganegaraan yang mengandung nilai persatuan bangsa.

3. Kesejahteraan dan kemandirian, baik dalam memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan sarana kehidupan maupun menciptakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Budaya inovasi berbasis pengetahuan, menekankan pada universalitas, kebebasan ilmiah, kebebasan berpikir, profesionalisme, dan tanggung jawab ilmiah.
5. Pendekatan sistem yang menjembatani kepentingan makro dan mikro, berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif, dan berpihak kepada masyarakat miskin.
6. Hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran serta menghormati Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

3.4 Nilai (Value)

Nilai yang menjadi acuan Pembangunan Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 adalah:

1. Akuntabel.
2. Visioner.
3. Inovatif.
4. Prima.
5. Partisipatoris.

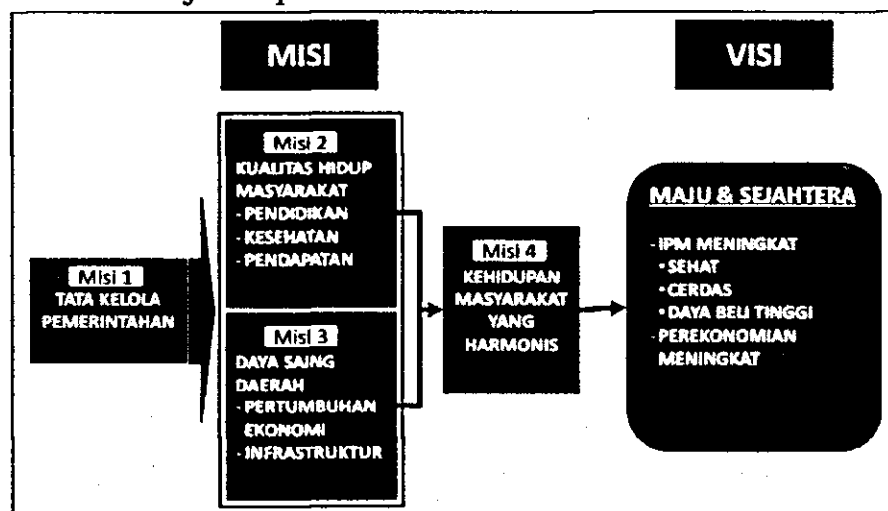
BAB IV **KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH** **ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI** **LANGKAH MENUJU PACITAN MAJU DAN SEJAHTERA**

Untuk menjadi daerah yang menguasai Iptek, tidak cukup hanya menggeluti aspek piranti keras, tetapi juga harus menempatkan nilai dan budaya Iptek sebagai urat nadi kehidupan masyarakat, seperti berpildr analitis, kritis dan cerdas, kesadaran akan mutu dan standar, budaya kerja yang tertib aturan, disiplin waktu, serta terbuka terhadap cara baru. Pembangunan Iptek pada dasarnya membentuk iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iptek menentukan tingkat efektivitas serta efisiensi proses transformasi sumber daya baru yang lebih beruilai. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan Iptek sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan, kesejahteraan, kemandirian dan daya saing daerah.

Hal paling penting dalam kaitan pembangunan Iptek Kabupaten Pacitan adalah penegasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 mengenai peran Iptek yang diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya, untuk menjadikan Kabupaten Pacitan memiliki daya saing. Sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025, Visi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah **“Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat”**. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 (Empat) Misi sebagai berikut:

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat;
3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
4. Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian Visi melalui 4 (Empat) Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 disajikan pada Gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 4.1
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021

Sebagaimana Gambar 4.1, untuk mewujudkan Visi "*Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat*" langkah kesatu yang harus dilakukan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan terlebih dahulu sebagaimana Misi Kesatu. Tata kelola pemerintahan yang harus diperkuat terutama kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan harus memiliki SDM yang profesional, agar mampu memberikan pelayanan publik dengan lebih baik, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel serta mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Selanjutnya dengan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat mendukung Misi Kedua untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat, melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Di samping itu dengan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan didukung kualitas hidup masyarakat yang baik diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Untuk meningkatkan daya saing daerah (Misi Ketiga), maka pertumbuhan ekonomi harus lebih dipacu selama 5 (lima) tahun ke depan, melalui program-program pembangunan bidang ekonomi dengan menggerakkan potensi daerah terutama pariwisata, pertanian (agropolitan) dan perikanan (minapolitan) yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Ketiga Misi tersebut akan dapat berjalan dan diwujudkan apabila kondisi masyarakatnya kondusif dan harmonis, sebagaimana harapan Misi Keempat yaitu meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat. Apabila Keempat Misi tersebut dapat diwujudkan, maka Visi pembangunan Kabupaten Pacitan "*Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat*" 5 (lima) tahun ke depan akan tercapai dengan indikator masyarakat Pacitan makin sehat, makin cerdas dan daya belinya tinggi atau dengan kata lain indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan meningkat serta perekonomian Kabupaten Pacitan juga meningkat.

Empat Misi tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah selama 5 (Lima) Tahun (2016-2021). Pada dasarnya dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan penetapan ke arah manakah perkembangan Kabupaten Pacitan, dan apa yang hendak dicapai dalam periode lima tahun ke depan, bagaimana mencapainya, dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Upaya mencapai keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan tidak dapat dilepaskan dari dukungan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptekin. Oleh karena itu, Jakstrada Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 sebagai "*Langkah Menuju Pacitan Maju dan Sejahtera (LAJUPAMARA) Berbasis Iptekin*".

4.1 Tujuan

Tujuan Pembangunan Daerah Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 adalah:

1. Meningkatkan penguasaan Iptek sebagai basis membangun daya saing, kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pacitan.
2. Meningkatkan kontribusi Iptek untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan sumber daya yang berbasis kearifan lokal untuk memantapkan keunggulan kompetitif pembangunan Kabupaten Pacitan.

4.2 Sasaran

Sasaran Pembangunan Daerah Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 secara garis besar dirancang menyangkut 2 (dua) hal, yaitu berkaitan wahana pembangunan Iptek, dan Substansi Iptek itu sendiri. Secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek untuk mendukung pembangunan bidang fokus sesuai dengan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
2. Meningkatnya penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek untuk mendukung Inovasi Daerah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi, dan pengelolaan sumber daya alam, serta sumber daya yang berbasis kearifan lokal.
3. Meningkatnya ketersediaan, daya guna dan hasil guna sumber daya Iptek (Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Kelembagaan).
4. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan oleh dunia usaha dan industri daerah, serta tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka Inovasi Daerah.
5. Terwujudnya iklim kondusif bagi berkembangnya budaya Iptek, budaya Inovasi Daerah berbasis kearifan lokal, sistem pembinaan dan pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), serta sistem standardisasi.

4.3 Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran di atas, maka Pembangunan Daerah Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek yang berorientasi kebutuhan riil untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan prioritas bidang fokus pembangunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
2. Meningkatkan pendayagunaan hasil kelitbangan bidang prioritas Iptek untuk peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan,

penguatan ketahanan pangan daerah; pembangunan infrastruktur dasar berkelanjutan, peningkatan kehidupan sosial, beragama dan pelestarian budaya lokal, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, pembangunan kawasan terpadu wilayah pengembangan, dan penguatan inovasi daerah.

3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek.
4. Menciptakan iklim inovasi daerah dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong penguatan struktur industri.
5. Menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya Iptek, budaya inovasi, dan penghargaan masyarakat terhadap Iptek.

4.4 Prioritas Utama Bidang Fokus

Bertitik tolak dari program prioritas utama (HASTA TAMA) dan Unggulan Pengembangan Kawasan (BANGUN CITA) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, dan memperhatikan JAKSTRADA IPTEK Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka ditetapkan 10 (sepuluh) Bidang Fokus yang menjadi prioritas utama implementasi Pembangunan Daerah Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan;
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Kerakyatan;
5. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah;
6. Pembangunan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan;
7. Peningkatan Kehidupan Sosial, Beragama dan Pelestarian Budaya Lokal;
8. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien;
9. Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pengembangan;
10. Penguatan Inovasi Daerah.

Sasaran dukungan pembangunan Iptek untuk masing-masing Bidang Fokus tersebut, adalah:

1. Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan
Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya akses dan mutu pendidikan, yang meliputi tema riset:
 - a. Peningkatan Akses Pendidikan;
 - b. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan.
2. Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan
Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang meliputi tema riset:
 - a. Peningkatan Akses Kesehatan;
 - b. Peningkatkan Mutu Layanan Kesehatan.

3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung menurunnya angka kemiskinan, pengangguran, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang meliputi tema riset:

- a. Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan;
- b. Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan;
- c. Perluasan Kesempatan Kerja dan Usaha;
- d. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung menguatnya kondisi perekonomian daerah, meningkatnya: 1) kemandirian Koperasi dan UMKM, 2) kinerja sektor industri, 3) kinerja sektor pariwisata daerah, dan 4) daya saing sektor pertanian, yang meliputi tema riset:

- a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- b. Peningkatan Kemandirian Koperasi dan UMKM (Kelembagaan, Akses Permodalan, Kualitas SDM, Pemasaran);
- c. Peningkatan Kinerja Sektor Industri (Iklim Investasi, Infrastruktur, Keterkaitan, Daya Tarik Industrial, Keunggulan Kompetitif);
- d. Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Daerah (Pengembangan, Promosi/Pemasaran);
- e. Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian (Intensifikasi, Ekstensifikasi, Revitalisasi).

5. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan, yang meliputi tema riset:

- a. Peningkatan Ketersediaan Pangan;
- b. Peningkatan Aksesibilitas Pangan;
- c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan.

6. Pembangunan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya layanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah dan kualitas lingkungan, yang meliputi tema riset:

- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar;
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Lingkungan Hidup.

7. Peningkatan Kehidupan Sosial, Beragama dan Pelestarian Budaya Lokal

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban, yang meliputi tema riset: Peningkatan Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

8. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis IT serta transparansi,

akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi tema riset:

- a. Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;
- b. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pengembangan

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung terpadunya pembangunan wilayah berdasarkan rencana tata ruang, yang meliputi tema riset Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah:

- 1) Bandar-Nawangan-Tegalombo (Konsep Pengembangan Agropolitan dan Wisata Sejarah);
- 2) Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan (Konsep Pengembangan Minapolitan, Pertanian dan Jasa);
- 3) Punung-Pringkuku-Donorojo (Konsep Pengembangan Ekowisata Geopark); dan
- 4) Pacitan-Arjosari-Kebonagung (Konsep Pengembangan Minapolitan, Perdagangan dan Jasa).

10. Penguatan Inovasi Daerah

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang meliputi tema riset:

- a. Inovasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Bidang Fokus Pembangunan Daerah Iptek tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Agenda Riset Daerah (ARD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021. Keberadaan ARD sangat penting sebagai acuan bersama bagi seluruh Unsur Pelaksana Pembangunan Daerah Iptek di Kabupaten Pacitan, dan diharapkan dapat berfungsi sebagai media interaksi/koordinasi antara berbagai pelaku Iptekin, serta wahana untuk mengarahkan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, penyebarluasan, dan pemanfaatan Iptekin dalam upaya mengatasi Permasalahan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pacitan.

BAB V PENUTUP

Dokumen Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (JAKSTRADA IPTEK) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 ini merupakan Dokumen Strategis yang disusun untuk membentuk landasan dan arah Pembangunan Daerah Iptek Kabupaten Pacitan yang berkelanjutan untuk mendukung implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Dokumen ini hanya memuat hal Strategis. Sedangkan uraian lebih detail sebagai turunan dari Dokumen ini untuk masing-masing Bidang Fokus dalam bentuk Tema Riset, Topik Riset dan Judul Riset disusun tersendiri dalam Dokumen Agenda Riset Daerah (ARD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021. ARD merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Jakstrada Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021.

Demikian Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (JAKSTRADA IPTEK) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 ini disusun dan ditetapkan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PACITAN



INDARTATO